

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia - Penulis
TEMA : Delegitimasi Politik Citra
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari **Rabu** Tanggal **20** Bulan **Mei** Tahun **2009** Halaman **6** Kolom **3**

RINGKASAN :

Menyindir, mencela, atau mendiskreditkan lawan atau pesaing seperti tidak bisa dipisahkan dari dunia politik. Pada tataran representasi, ada kehendak baik politisi untuk membangun citra secara jujur dan transparan sehingga citra menjadi cermin realitas. Pada tataran ini, citra merupakan laporan, rekaman, atau gambar nyata dari tindakan, kegiatan, dan sikap politisi. Bentuk jejak rekam itu terdiri dari jasa, dalam menyumbang kesejahteraan bersama atau perdamaian, terpatri dalam inskripsi sosial. Tidak ada rekayasa, penipuan, atau upaya menyembunyikan kepentingan kekuasaan. Prinsip kekuasaan adalah "*Take your desire for reality!*" strategi ini meyakinkan melalui prinsip "yang real adalah rasional". Maka, hasil pemilu perlu dibuat rasional agar dianggap *real*. Jangan terlalu mencolok kemenangan agar memberikan kesan rasional, tetapi cukup memuaskan keinginan. Dalam dunia simulasi, kerancuan prinsip realitas dengan prinsip keinginan dianggap biasa. Demikian yang ditulis oleh Haryatmoko, pengajar Pascasarjana FIB UI.

CATATAN :

Delegitimasi Politik Citra

Oleh HARYATMOKO

Menyindir, mencela, atau mendiskreditkan lawan atau pesaing seperti tidak bisa dipisahkan dari dunia politik.

Ambisi untuk meraih kekuasaan atau upaya mempertahankan kekuasaan adalah pemicu persaingan di mana pertarungan kekuatan bisa mengambil beragam bentuk, dari pengerahan massa, *black campaign*, sampai ke polemik wacana.

Dalam upaya penggalangan opini dan pencitraan diri, politisi mengerahkan semua sarana persuasi dari bentuk paling transparan, yaitu representasi, sampai manipulasi dan simulasi (J Baudrillard, 1981:17).

Representasi dan politik santun

Pada tataran representasi, ada kehendak baik politisi untuk membangun citra secara jujur dan transparan sehingga citra menjadi cermin realitas. Pada tataran ini, citra merupakan laporan, rekaman, atau gambar nyata dari kegiatan, tindakan, dan sikap politisi. Bentuk jejak rekam itu terdiri dari jasa dalam menyumbang kesejahteraan bersama atau perdamaian, terpatri dalam inskripsi sosial. Tidak ada rekayasa, penipuan, atau upaya menyembunyikan kepentingan kekuasaan.

Pencitraan tipe ini mengandaikan sikap tanpa pamrih karena politik diukur dari keutamaan politisi dan upaya mengabdikan diri (H Arendt, 1951). Pengabdian diri terwujud berkat jasanya terhadap masyarakat dan dikenang karena politik santun. Santun bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* antarpelaku. Dalam konteks ini, polemik dan saling sindir/kecam yang marak di kalangan penting jauh dari gambar politik santun.

Kebiasaan itu sering fatal akibatnya. Hanya karena tersinggung atau merasa

diabaikan, kerja sama pun berantakan, padahal yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa.

Tanpa disadari, kebiasaan itu menyingkap sisi impulsif kepribadian politisi, yang mengesankan ketidakmatangan, jauh dari sikap negarawan. Perasaan pribadi terlalu mendominasi diri politisi di arena politik. Sebagai tokoh publik, politisi dituntut mampu menguasai diri agar tidak dilumpuhkan oleh sindiran dan kritik. Jangan sampai rasa tersinggung mengalahkan politisi dari upaya kerja sama membangun negeri ini. Tipe citra yang dibangun dari representasi amat langka karena defisit kepercayaan rakyat kian menekan politisi untuk menyembunyikan kelemahan atau menyamarkan kepentingan pribadi/kelompok.

Pencarian legitimasi

Kebanyakan politisi lebih dekat dengan tipe kedua pencitraan, yaitu saat citra menyembunyikan dan memberikan gambar salah akan realitas. Pada tataran ini, pencitraan tidak lain kecuali bagian dari mekanisme ideologi. Pencitraan mengandalkankan mekanisme ideologi karena ada defisit kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Kekuasaan menuntut lebih dari kepercayaan yang bisa diberikan rakyat.

Untuk menutupi kekurangannya, dilakukan manipulasi, entah dalam pemilu atau prosedur demokrasi. Agama sering dilibatkan sebagai sistem pembenaran. Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama adalah hubungan kekuasaan karena tiap kekuasaan selalu mencari legitimasi.

Pelaku yang masuk bersaing dalam arena politik harus menguasai kode-kode dan aturan main. Keberhasilan politisi bergantung pada struktur dan besarnya kapital yang dimiliki dan strategi penempatannya (P Bourdieu, 1979). Maka, amat masuk akal meski memberikan kesan tidak *fair*,

bila merasa terancam karena lemah dalam kepemilikan kapital (budaya, ekonomi, sosial), politisi cenderung investasi dalam kapital simbolik dengan mencari dukungan agama atau mengacu kepada ayat-ayat kitab suci. Pada gilirannya, sentimen keagamaan diharapkan menumbuhkan solidaritas dan kepercayaan (kapital sosial). Strategi ini menempatkan agama sebagai faktor identitas, dimaksudkan bisa memperkuat kohesi sosial karena memberikan stabilitas sosial dan status.

Tekanan pada orientasi kekuasaan cenderung menghalalkan semua rekayasa, intrik, dan penipuan agar tujuan kekuasaan tercapai. Dengan cara-cara itu, defisit kepercayaan rakyat hendak ditutupi atau dicarikan kompensasinya. Melalui upaya serius, manipulasi seperti ini masih bisa dibongkar atau dicek benar/salahnya. Jadi, dalam manipulasi politik masih mengandaikan ada kebenaran dan membiarkan prinsip realitas tetap utuh. Hanya realitas ditutupi atau disclubungi. Namun, akan lebih sulit bila masuk ke politik simulasi karena prinsip realitas tidak relevan lagi.

Simulasi sulit dibuktikan

Dalam simulasi, citra hendak menyembunyikan bahwa tidak ada realitas. Lalu, citra berperan menjadi penampaknya. Citra sama sekali tak berbubungan dengan realitas, hanya menyerupai dirinya (simulasi). Simulasi dipertentangkan dengan representasi. Representasi bertolak dari prinsip bahwa ada kesetaraan antara tanda dan realitas, sedangkan simulasi mulai dari negasi terhadap tanda sebagai nilai. Lalu, penanda seakan sudah menggantikan makna (pertanda).

Sulit dibuktikan benar salahnya sinyal-men adanya manipulasi dalam penghitungan hasil pemilu. Simulasi ditandai dengan hadirnya model lebih dulu, yaitu hasil pemilu sudah didesain. Lebih meyakinkan lagi karena jajak pendapat (penan-

da) sebelum pemilu sudah mengarahkan opini.

Semua hipotesis manipulasi serba mungkin: manipulasi penghitungan hasil pemilu; lembaga peneliti memberi legitimasi ilmiah; *quick count* (yang sebenarnya merupakan penanda) sudah dianggap hasil itu sendiri (pertanda). Semua hipotesis itu sama benarnya, tetapi pencarian bukti tidak mampu memverifikasi ketidakpastian semua penafsiran itu.

Antisipasi (hasil pemilu yang sudah didesain) dan kekacauan fakta dengan modelnya (ketidaksesuaian persentase hasil penghitungan manual dan *quick count*) membuka semua kemungkinan penafsiran, termasuk yang paling kontradiktif. Semua benar karena kebenaran dapat dipertukarkan. Strategi simulasi terdiri dari memberi kesan lebih dulu melalui penguraian sandi (jajak pendapat dan *quick count*) dan mengatur ritual media. Ritual ini membuat komunikasi media ditangkap seolah *quick count* adalah hasil final.

Secara psikologis, masyarakat sudah disiapkan untuk menrima hasil final sesuai dengan penghitungan cepat. Maka, jika hasil penghitungan manual bisa membuktikan yang sebaliknya, dengan mudah akan dipatahkan, tanpa ada protes berarti karena kemungkinan itu sudah diantisipasi dalam cara presentasi.

Prinsip kekuasaan ialah "*Take your desire for reality!*". Strategi ini meyakinkan melalui prinsip "yang real adalah rasional". Maka, hasil pemilu perlu dibuat rasional agar dianggap real. Jangan terlalu mencolok kemenangan agar memberikan kesan rasional, tetapi cukup memuaskan keinginan. Dalam dunia simulasi, kerancuan prinsip realitas dengan prinsip keinginan dianggap biasa.

HARYATMOKO

Pengajar Pascasarjana FIB UI dan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta